



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BALI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I KADEK PUTRA SUANTARA
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 1000701

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 350.000.000

1. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI
Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 178.000.000

1. MOBIL, TOYOTA SEDAN Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SATRIA FU Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
4. MOBIL, HONDA BRIO MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 21.247.224

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 549.247.224

III. HUTANG Rp. 12.868.240

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 536.378.984



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.